



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

PERJANJIAN KINERJA

DIREKTORAT
PRASARANA
PERKERETAAPIAN
TAHUN 2020



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena karunia-Nya penyusunan Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun Anggaran 2020 dapat terselesaikan.

Penyusunan Perjanjian Kinerja ini merupakan pemenuhan terhadap amanat Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Sebagai salah satu unit organisasi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Direktorat Prasarana Perkeretaapian berusaha menjadi instansi pemerintah yang akuntabel, transparan, efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (*Good Governance*) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mewujudkan hal tersebut maka disusun Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2020 yang merupakan proses penting agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dapat diikuti dan dipantau pencapaiannya melalui indikator - indikator kinerja yang direncanakan sehingga akuntabilitas kinerja dapat lebih mudah ditingkatkan.

Dengan telah disusunnya Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun Anggaran 2020, diharapkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Prasarana Perkeretaapian semakin terarah menuju terwujudnya *Good Governance*.

Jakarta, Januari 2020

DIREKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN
DITJEN PERKERETAAPIAN



HERU WISNU WIBOWO
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650710 199003 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ir. HERU WISNU WIBOWO, M.Sc**

Jabatan : Direktur Prasarana Perkeretaapian

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Ir. ZULFIKRI, M.Sc.,DEA**

Jabatan : Direktur Jenderal Perkeretaapian

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2020

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Ir. ZULFIKRI, M.Sc.,DEA
Pembina Utama Madya(IV/d)
NIP. 19620709 199203 1 002

Ir. HERU WISNU WIBOWO, M.Sc
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650710 199003 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I	PENDAHULUAN	I – 1
1.1.	Latar Belakang	I – 1
1.2.	Maksud dan Tujuan	I – 2
1.3.	Kedudukan, Tugas, dan Fungsi	I – 2
1.4.	Struktur Organisasi	I – 4

**BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DIREKTORAT PRASARANA
PERKERETAAPIAN II – 1**

2.1. Arah Kebijakan dan Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian .. II – 1

2.2. Tujuan dan Sasaran..... II – 3

BAB III	RENCANA KINERJA DIREKTORAT PRASARANA	
	PERKERETAAPIAN TAHUN 2020.....	III – 1
3.1.	Sasaran dan Indikator Kinerja	III – 1
3.2.	Revisi Rencana Kinerja Program/Utama	III – 2

BAB IV PENUTUP **IV – 1**

LAMPIRAN – LAMPIRAN

LAMPIRAN A	:	PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN DIREKTORAT PERKERETAAPIAN 2020
LAMPIRAN B	:	RENCANA AKSI ATAS KINERJA TAHUN DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN 2020
LAMPIRAN C	:	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TAHUN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor : 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor : 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, unit kerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai lembaga penunjang penggerak pembangunan nasional mempunyai peranan penting dalam pelayanan jasa transportasi di bidang perkeretaapian. Pembangunan bidang transportasi perkeretaapian akan berpengaruh besar terhadap perekonomian nasional, mengingat kegiatan di bidang transportasi ini berperan penting dalam kegiatan baik angkutan penumpang maupun distribusi barang dan jasa.

Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2020 dilaksanakan sebagai wujud pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 45 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2020 di dalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai selama Tahun 2020.

Dalam rangka mengimplementasikan Rencana Strategis (Renstra) maka setiap jajaran unit kerja Eselon II wajib menyusun Perjanjian Kinerja dengan mengacu pada target Indikator Kinerja Utama yang berbabis *outcome* / output penting.

Perjanjian Kinerja ini selanjutnya akan ditetapkan sebagai target pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan yang direncanakan pada Tahun 2020 dengan mempertimbangkan beberapa aspek seperti pendanaan, sumber daya manusia, dan waktu pelaksanaan kegiatan.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 ini dimaksudkan untuk menetapkan target pencapaian terhadap sasaran pembangunan perkeretaapian yang pada akhirnya dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan atau kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2020, sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah untuk menetapkan indikator - indikator kinerja yang akan dijadikan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan maupun realisasi dari kegiatan - kegiatan yang telah diprogramkan sebelumnya.

1.3. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara dipandang perlu sebagai landasan dan acuan pelaksanaan tugas instansi pemerintah.

Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan yang didalamnya terdapat unit kerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian secara legalitas kedudukannya dibawah organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana perkeretaapian.

Direktorat Prasarana Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultansi dan konstruksi prasarana perkeretaapian;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi

kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api dan kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultasi dan konstruksi prasarana perkeretaapian;

- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api dan kelaikan prasarana perkeretaapian serta pelaksana jasa konsultasi dan konstruksi prasarana perkeretaapian;
- d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api dan kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultasi dan konstruksi prasarana perkeretaapian;
- e. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas rencana jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultasi dan konstruksi prasarana perkeretaapian; dan
- f. Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, dan rumah tangga Direktorat.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Direktorat Prasarana Perkeretaapian mempunyai kewenangan antara lain :

- a. Rehabilitasi / perawatan prasarana perkeretaapian;
- b. Pembangunan prasarana perkeretaapian dan pendukung operasional kereta api;
- c. Pembinaan, monitoring evaluasi dan pemeriksaan kualitas prasarana perkeretaapian;
- d. Sertifikasi kelaikan prasarana perkeretaapian;
- e. Standarisasi material, sistem, desain di bidang prasarana perkeretaapian.

1.4. STRUKTUR ORGANISASI

Direktorat Prasarana Perkeretaapian terdiri dari :

1. Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah I

Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api wilayah I.

Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah I menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan administrasi material dan pergudangan, pemeriksaan, pembangunan, pengoperasian, perawatan, ijin pemanfaatan, serta jasa konsultasi dan konstruksi jalur, bangunan dan stasiun kereta api di wilayah I yang meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan administrasi material dan pergudangan, pemeriksaan, pembangunan, pengoperasian, perawatan, ijin pemanfaatan, serta jasa konsultasi dan konstruksi jalur, bangunan dan stasiun kereta api di wilayah I yang meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang penyelenggaraan administrasi material dan pergudangan, pemeriksaan, pembangunan, pengoperasian, perawatan, ijin pemanfaatan, serta jasa konsultasi dan konstruksi jalur, bangunan dan stasiun kereta api di wilayah 1 yang meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan administrasi material dan pergudangan, pemeriksaan, pembangunan, pengoperasian, perawatan, ijin pemanfaatan, serta jasa konsultasi dan konstruksi jalur, bangunan dan stasiun kereta api di wilayah I yang meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua; dan

- e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan administrasi material dan pergudangan, pemeriksaan, pembangunan, pengoperasian, perawatan, ijin pemanfaatan, serta jasa konsultansi dan konstruksi jalur, bangunan dan stasiun kereta api di wilayah I yang meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.

2. Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah II

Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api wilayah II.

Subdirektorat Jalur dan Bangunan KA Wilayah II menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan administrasi material dan pergudangan, pemeriksaan, pembangunan, pengoperasian, perawatan, ijin pemanfaatan, serta jasa konsultansi dan konstruksi jalur, bangunan dan stasiun kereta api di wilayah II yang meliputi Pulau Sumatera dan Kalimantan;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan administrasi material dan pergudangan, pemeriksaan, pembangunan, pengoperasian, perawatan, ijin pemanfaatan, serta jasa konsultansi dan konstruksi jalur, bangunan dan stasiun kereta api di wilayah II yang meliputi Pulau Sumatera dan Kalimantan;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang penyelenggaraan administrasi material dan pergudangan, pemeriksaan, pembangunan, pengoperasian, perawatan, ijin pemanfaatan, serta jasa konsultansi dan konstruksi jalur, bangunan dan stasiun kereta api di wilayah II yang meliputi Pulau Sumatera dan Kalimantan;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan administrasi material dan pergudangan, pemeriksaan, pembangunan, pengoperasian, perawatan, ijin pemanfaatan, serta jasa konsultansi dan konstruksi jalur, bangunan dan

stasiun kereta api di wilayah II yang meliputi Pulau Sumatera dan Kalimantan; dan

- e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan administrasi material dan pergudangan, pemeriksaan, pembangunan, pengoperasian, perawatan, ijin pemanfaatan, serta jasa konsultasi dan konstruksi jalur, bangunan dan stasiun kereta api di wilayah II yang meliputi Pulau Sumatera dan Kalimantan.

3. Subdirektorat Fasilitas Operasi Kereta Api

Subdirektorat Fasilitas Operasi Kereta Api mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitas operasi kereta api.

Subdirektorat Fasilitas Operasi Kereta Api menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan pemeriksaan, penyelenggaraan pembangunan, pengoperasian, perawatan, serta pelaksanaan jasa konsultasi dan konstruksi fasilitas operasi kereta api yang meliputi persinyalan, telekomunikasi, pelistrikan dan bangunan pendukung fasilitas operasi kereta api;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pemeriksaan, penyelenggaraan pembangunan, pengoperasian, perawatan, serta pelaksanaan jasa konsultasi dan konstruksi fasilitas operasi kereta api yang meliputi persinyalan, telekomunikasi, pelistrikan dan bangunan pendukung fasilitas operasi kereta api;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang pelaksanaan pemeriksaan, penyelenggaraan pembangunan, pengoperasian, perawatan, serta pelaksanaan jasa konsultasi dan konstruksi fasilitas operasi kereta api yang meliputi persinyalan, telekomunikasi, pelistrikan dan bangunan pendukung fasilitas operasi kereta api;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan pemeriksaan, penyelenggaraan pembangunan, pengoperasian, perawatan, serta pelaksanaan jasa konsultasi dan konstruksi fasilitas operasi kereta api yang meliputi persinyalan,

telekomunikasi, pelistrikan dan bangunan pendukung fasilitas operasi kereta api; dan

- e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan pemeriksaan, penyelenggaraan, pembangunan, pengoperasian, perawatan, serta pelaksanaan jasa konsultasi dan konstruksi fasilitas operasi kereta api yang meliputi persinyalan, telekomunikasi, pelistrikan dan bangunan pendukung fasilitas operasi kereta api.

4. Subdirektorat Kelaikan Jalur dan Bangunan Kereta Api

Subdirektorat Kelaikan Jalur dan Bangunan Kereta Api mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api.

Subdirektorat Kelaikan Jalur dan Bangunan Kereta Api menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, pengesahan hasil uji, serta pengolahan dan penyajian data di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, pengesahan hasil uji, serta pengolahan dan penyajian data di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, pengesahan hasil uji, serta pengolahan dan penyajian data di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, pengesahan hasil uji, serta pengolahan dan penyajian data di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api; dan

- e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, pengesahan hasil uji, serta pengolahan dan penyajian data di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api.

5. Subdirektorat Kelaikan Fasilitas Operasi Kereta Api

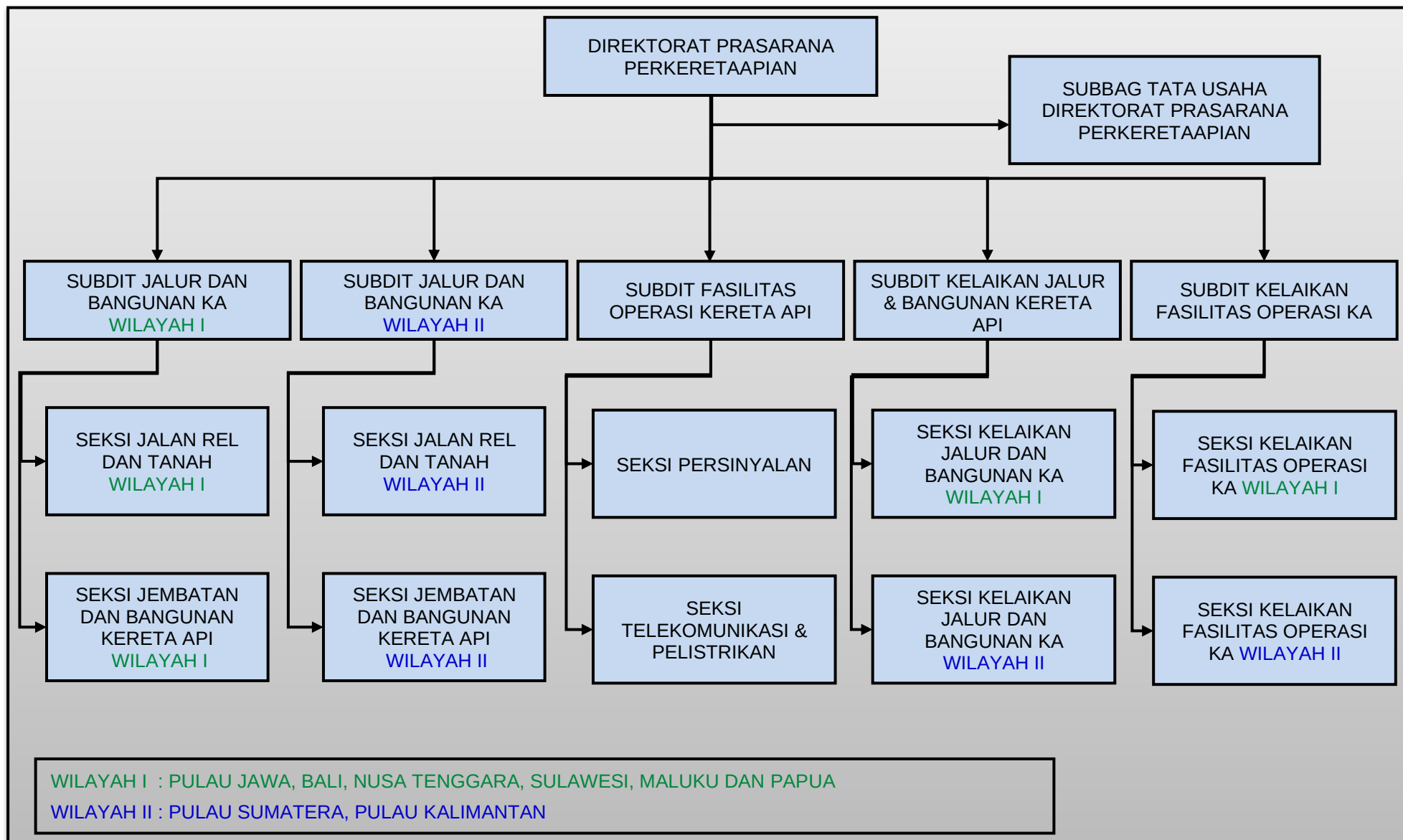
Subdirektorat Kelaikan Fasilitas Operasi Kereta Api mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikan fasilitas operasi kereta api.

Subdirektorat Kelaikan Fasilitas Operasi Kereta Api menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kelaikan fasilitas operasi kereta api, pengesahan hasil uji, serta pengolahan dan penyajian data di bidang kelaikan fasilitas operasi kereta api;
- b. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kelaikan fasilitas operasi kereta api, pengesahan hasil uji, serta pengolahan dan penyajian data di bidang kelaikan fasilitas operasi kereta api;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelaikan fasilitas operasi kereta api, pengesahan hasil uji, serta pengolahan dan penyajian data di bidang kelaikan fasilitas operasi kereta api; dan
- d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikan fasilitas operasi kereta api, pengesahan hasil uji, serta pengolahan dan penyajian data di bidang kelaikan fasilitas operasi kereta api.

6. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, dan rumah tangga Direktorat.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Prasarana Perkeretaapian

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS

DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN

2.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai dengan tugas dan fungsinya merumuskan sejumlah arah kebijakan dan strategi pencapaian yang harus terlaksana dalam kurun waktu (5) lima tahun ke depan. Tabel berikut merupakan penjabaran tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian ke dalam arah kebijakan dan strategi pencapaian. Berikut merupakan tabel dari Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi.

NO	TUJUAN DAN SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
I	Tujuan 1: Meningkatkan konektivitas dan keterpaduan moda transportasi dengan jaringan kereta api		
	Meningkatnya konektivitas jaringan perkeretaapian nasional.	Peningkatan konektivitas jaringan perkeretaapian nasional.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan jalur kereta api baru b. Reaktivasi jalur kereta api non-operasi c. Peningkatan kapasitas jalur kereta api eksisting (<i>double track</i>, elektrifikasi, penggantian rel dan bantalan, dsb) d. Pembangunan akses kereta api ke beberapa pelabuhan dan bandara e. Pelaksanaan studi kelayakan dan detail desain pembangunan jalur kereta api akses ke bandara dan pelabuhan f. Peningkatan pelaksanaan bimbingan dan koordinasi teknis dalam rangka pengembangan jaringan pelayanan angkutan penumpang

NO	TUJUAN DAN SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
II	Tujuan 3: Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi kereta api.		
	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi perkeretaapian.	Peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan sertifikasi sarana perkeretaapian b. Peningkatan sertifikasi prasarana perkeretaapian c. Peningkatan pemenuhan kebutuhan fasilitas keselamatan dan pengujian d. Peningkatan panjang jalur kereta api yang terpasang sistem pengendali keselamatan e. Peningkatan pemenuhan kebutuhan IMO f. Pengurangan <i>backlog</i> pemeliharaan prasarana melalui peningkatan / rehabilitasi jalur kereta api, peningkatan / rehabilitasi jembatan, peningkatan persinyalan dan telekomunikasi, serta perlistrikan dan bangunan operasional g. Pengurangan <i>backlog</i> pemeliharaan sarana kereta api melalui pemeliharaan, pembaruan dan modifikasi sarana h. Peningkatan kinerja penyelenggaraan angkutan lebaran , natal, dan tahun baru i. Penyusunan pedoman identifikasi daerah rawan kecelakaan dan rawan bencana j. Penyusunan prosedur tindak lanjut akibat kecelakaan

NO	TUJUAN DAN SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
			k. Pelaksanaan kajian identifikasi rawan kecelakaan kereta api
III	Tujuan 2: Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi kereta api		
	Meningkatnya moda kereta api yang mendukung penghematan energi.	Peningkatan jumlah moda kereta api yang menggunakan energi rendah emisi melalui kereta api yang telah menggunakan energi listrik	a. Meningkatkan implementasi penggunaan teknologi ramah lingkungan berbasis rel b. Pengembangan jaringan dan layanan kereta api perkotaan c. Pengembangan jaringan kereta api cepat dan peningkatan kecepatan d. Pembaruan teknologi perkeretaapian e. Penyusunan NSPK teknologi kereta api terbaru

2.2. TUJUAN DAN SASARAN

Pembangunan Prasarana Perkeretaapian diselenggarakan dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

NO	PERSPECTIVE	TUJUAN	NO	SASARAN KEGIATAN
1	STAKEHOLDER PERSPECTIVE	Peningkatan prasarana yang handal, aman untuk pelayanan transportasi kereta api	1	Meningkatnya KEHANDALAN Prasarana Perkeretaapian
2	CUSTOMERS PERSPECTIVE	Peningkatan kapasitas pelayanan transportasi kereta api	2	Meningkatnya KAPASITAS Sarana dan Prasarana Transportasi Kereta Api
3	INTERNAL PERSPECTIVE	Peningkatan kualitas regulasi dalam mendukung penyelenggaraan perkeretaapian nasional	3	Terlaksananya PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN dalam Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian

NO	PERSPECTIVE	TUJUAN	NO	SASARAN KEGIATAN
4	LEARN & GROWTH PERSPECTIVE	Peningkatan pemenuhan standar keselamatan, keamanan, dan kinerja pengendalian transportasi kereta api	4	Meningkatnya Kinerja PENGENDALIAN dan PENGAWASAN Prasarana Perkeretaapian
		Peningkatan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan perkeretaapian	5	Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT di lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian

BAB III

RENCANA KINERJA

DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN

TAHUN 2020

3.1. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

Program Utama per sasaran yang akan dilaksanakan di Direktorat Prasarana Perkeretaapian yang disusun berdasarkan Cascading Indikator kinerja yang ada saat ini mulai dari Unit Kerja Eselon I s.d Unit Kerja Eselon III Mandiri dan telah ditetapkan melalui Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor: PR.006/63/K1/DJKA/19 tanggal 20 Desember 2019 perihal Tindak Lanjut Rapat Persiapan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2019 dan Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020 dan Draft Rancangan Rencana Strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2020 - 2024 dan sebagai berikut :

PERSPECTIVE	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
STAKEHOLDER PERSPECTIVE	Meningkatnya KEHANDALAN Prasarana Perkeretaapian	Jumlah Perawatan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara
		Persentase Pengoperasian Jalur KA yang sesuai dengan TQI
CUSTOMERS PERSPECTIVE	Meningkatnya KAPASITAS Prasarana transportasi kereta api	Jumlah PKN / PKW / Simpul Transportasi yang Terhubung Jalur Kereta Api
INTERNAL PERSPECTIVE	Terlaksananya PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN dalam Penyelenggaraan Prasarana perkeretaapian	Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Prasarana Perkeretaapian
LEARN & GROWTH PERSPECTIVE	Meningkatnya Kinerja PENGENDALIAN dan PENGAWASAN Prasarana Perkeretaapian	Jumlah Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian
		Persentase Penetapan / Persetujuan / Perijinan di Bidang Prasarana Perkeretaapian yang Tepat Waktu

PERSPECTIVE	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
LEARN & GROWTH PERSPECTIVE	Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT di Lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Persentase Penyerapan Anggaran
		Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Prasarana Perkeretaapian

3.2. RENCANA KINERJA PROGRAM / UTAMA

Berdasarkan Rancangan Rencana Strategis Bidang Prasarana Perkeretaapian Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Perjanjian Rencana Kinerja adalah sebagai berikut :

3.2.1. Sasaran Meningkatnya KEHANDALAN Prasarana Perkeretaapian dengan Output Indikator Kinerja Kegiatan adalah

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET CAPAIAN TAHUN 2020
Jumlah Perawatan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara	Km	141,168
Persentase Pengoperasian Jalur KA yang sesuai dengan TQI	%	82,84

3.2.2. Sasaran Meningkatnya KAPASITAS Prasarana Transportasi Kereta Api dengan Output Indikator Kinerja Kegiatan adalah

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET CAPAIAN TAHUN 2020
Jumlah PKN / PKW / Simpul Transportasi yang Terhubung Jalur Kereta Api	Lokasi	7
<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Jalur KA Makassar - Pare Pare Segmen 3 (Marros-Pangkep) PKN = Marros PKW = Pangkajene, Barru Pembangunan jalur KA antara Rantau Prapat – Kota Pinang (segmen Rantau Prapat – Pondok S2) PKW = Rantau Prapat Pembangunan jalur KA Bandara Raden Inten II 		

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET CAPAIAN TAHUN 2020
<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan KA Bandara NYIA Kulonprogo sepanjang 6 Km'sp Pembangunan Jalur KA menuju Pelabuhan Tanjung Mas Simpul = Pembangunan jalur KA menuju Bandara Raden Inten II, Bandara NYIA Kulonprogo dan Pelabuhan Tanjung Mas		

3.2.3. Sasaran Terlaksananya PERUMUSAN REGULASI dan KEBIJAKAN dalam Penyelenggaraan Prasarana perkeretaapian dengan Output Indikator Kinerja Kegiatan adalah

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET CAPAIAN TAHUN 2020
Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Prasarana Perkeretaapian	Dokumen	38

3.2.4. Sasaran Meningkatnya Kinerja PENGENDALIAN dan PENGAWASAN Prasarana Perkeretaapian dengan Output Indikator Kinerja Kegiatan adalah

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET CAPAIAN TAHUN 2020
Jumlah Sertifikat Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	Sertifikat	150
Persentase Penetapan / Persetujuan / Perijinan di Bidang Prasarana Perkeretaapian yang Tepat Waktu	%	100

3.2.5. Sasaran Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT di Lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian dengan Output Indikator Kinerja Kegiatan adalah

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET CAPAIAN TAHUN 2020
Persentase Penyerapan Anggaran (%)	%	97,50
Perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	Rupiah	1.678.728.000

3.2.7. Rencana Kerja Anggaran Tahun 2019

Rencana Kerja Anggaran per Sasaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian pada Tahun 2020 dapat dikelompokkan sebagai berikut :

NO	SASARAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
1.	Meningkatnya KEHANDALAN Prasarana Perkeretaapian	1.580.995.883.000
2.	Meningkatnya KAPASITAS Prasarana Transportasi Kereta Api	3.140.264.036.000
3.	Terlaksananya PERUMUSAN REGULASI dan KEBIJAKAN dalam Penyelenggaraan Prasarana perkeretaapian	210.002.332.000
4.	Meningkatnya Kinerja PENGENDALIAN dan PENGAWASAN Prasarana Perkeretaapian	2.401.330.000
5.	Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT di Lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian	36.297.150.000
JUMLAH		4.969.960.731.000

Sedangkan anggaran per masing-masing jenis belanja Tahun 2020 pada Direktorat Prasarana Perkeretaapian adalah sebagai berikut :

NO	JENIS BELANJA	PAGU ANGGARAN (Rp)
1.	Belanja Pegawai	3.258.599.343.000
2.	Belanja Barang	1.711.361.388.000
3.	Belanja Modal	0
JUMLAH		4.969.960.731.000

BAB IV PENUTUP

Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2020 terdiri dari 5 (Lima) Sasaran Kegiatan dengan 8 (Delapan) Indikator Kinerja Kegiatan, meliputi:

- Sasaran 1. Meningkatnya KEHANDALAN Prasarana Perkeretaapian, dengan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut :
- a. Jumlah Perawatan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara dengan target 141,168 Km
 - b. Persentase Pengoperasian Jalur KA yang sesuai dengan TQI dengan target 82,84 %
- Sasaran 2. Meningkatnya KAPASITAS Prasarana Transportasi Kereta Api, dengan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut :
- Jumlah PKN / PKW / Simpul Transportasi yang Terhubung Jalur Kereta Api 7 Lokasi
- Sasaran 3. Terlaksananya PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian dengan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut :
- Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Prasarana Perkeretaapian dengan target 38 Dokumen
- Sasaran 4. Meningkatnya Kinerja PENGENDALIAN dan PENGAWASAN Prasarana Perkeretaapian dengan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut :
- 1. Jumlah Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian dengan target 150 Sertifikat
 - 2. Persentase Penetapan / Persetujuan / Perijinan di Bidang Prasarana Perkeretaapian yang Tepat Waktu dengan target 100 %

Sasaran 5. Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT di Lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian dengan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut :

- a. Persentase Penyerapan Anggaran dengan target 97,50%
- b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Prasarana Perkeretaapian dengan target Rp. 1.678.728.000,-

Dengan program utama di atas diharapkan mampu mewujudkan sasaran dan tujuan pembangunan perkeretaapian sebagaimana yang tertuang dalam Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Prasarana Perkeretaapian.

Demikian Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2020 yang akan dilaksanakan dan dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan Direktorat Prasarana Perkeretaapian.

----- Selamat Bekerja -----

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET	ANGGARAN (Rp.)
1	Meningkatnya KEHANDALAN prasarana perkeretaapian	Jumlah Perawatan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara	Km	141,168	1.619.571.093.000
		Persentase Pengoperasian Jalur KA yang sesuai dengan TQI	%	82,84	
2	Meningkatnya KAPASITAS Prasarana transportasi perkeretaapian	Jumlah PKN/PKW/ Simpul Transportasi yang Terhubung Jalur Kereta Api	Lokasi	7	3.140.264.036.000
3	Terlaksananya PERUMUSAN REGULASI dan KEBIJAKAN dalam penyelenggaraan prasarana perkeretaapian	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Prasarana Perkeretaapian	Dokumen	38	171.427.122.000
4	Meningkatnya kinerja PENGENDALIAN dan PENGAWASAN prasarana perkeretaapian	Jumlah Sertifikat Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	Sertifikat	150	2.401.330.000
		Persentase Penetapan / Persetujuan / Perijinan di Bidang Prasarana Perkeretaapian yang Tepat Waktu	%	100	-
5	Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT di lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Persentase Penyerapan Anggaran (%)	%	97,50	36.297.150.000
		Perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	Rupiah	1.678.728.000	-

KEGIATAN

Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana serta Fasilitas Pendukung Kereta Api

ANGGARAN

Rp. 4.969.960.731.000

Jakarta, Januari 2020

Disetujui,
DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN



Ir. ZULFIKRI. M.Sc., DEA
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19620709 199203 1 002

DIREKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN



Ir. HERU WISNU WIBOWO, M.Sc
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650710 199003 1 002



RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
UNIT KERJA DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab
						Bulan-1	Bulan-2	Bulan-3	Bulan-4	Bulan-5	Bulan-6	Bulan-7	Bulan-8	Bulan-9	Bulan-10	Bulan-11	Bulan-12		
1	Meningkatnya KEHANDALAN Prasarana Perkeretaapian	JUMLAH PERAWATAN DAN PENGOPERASIAN PRASARANA PERKERETAAPIAN MILIK NEGARA (IMO)	Km	121	Panjang Jalur KA yang Dirawat Oleh PT KAI melalui dana IMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121	1,573,995,883,000	PPK IMO, Kasubid Jalur dan Bangunan KA WII I
			Km	20.168	Peningkatan Jalur Kereta Api Antara Brumbung- Tanggung sepanjang 10,732 Km dan Tanggung - Kedungjati sepanjang 9,436 Km Lintas Semarang - Solo di Wilayah Jawa Tengah termasuk Supervisi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.168	PPK IMO, Kasubid Jalur dan Bangunan KA WII I		
			Unit	1	Perbaikan Kestabilan Lereng Outlet Terowongan Lampegan BH 415 Km 73+1/2 antara Crg-Lp Lintas Bogor-Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		PPK IMO, Kasubid Jalur dan Bangunan KA WII I
			Unit	3	Pengadaan dan Pemasangan Perangkat Sensor Monitoring Struktur Jembatan pada 3 Lokasi Jembatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3		PPK IMO, Kasubid Jalur dan Bangunan KA WII I
			Batang	32,979	Pengadaan Bantalan Beton Termasuk Penambat di Wilayah Jawa Bagian Tengah	0	0	0	0	0	0	32979	-	-	-	-	-		PPK IMO, Kasubid Kelainan Jalur dan Bangunan KA
			Batang	634	Pengadaan Bantalan Kayu Termasuk Penambat di Wilayah Jawa Bagian Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	634		PPK IMO, Kasubid Kelainan Jalur dan Bangunan KA
			-	-	Pembayaran Rintang Jalan	Realisasi Pembayaran perbaikan/rehabilitasi jalur akibat rintang jalan (PLH)													PPK IMO, Kasubid Jalur dan Bangunan KA WII I
			Unit	140	Jumlah Fasilitas Operasi KA yang Dirawat Oleh PT KAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140		PPK IMO, Kasubid Fasilitas Operasi KA
			Km	4,399	Panjang Jalur KA yang Beroperasi di Pulau Jawa	4183	4183	4183	4183	4183	4183	4183	4183	4183	4183	4183	4183		PPK IMO, Kasubid Kelainan Fasilitas Operasi KA
			Km	1,478	Panjang Jalur KA yang Beroperasi di Pulau Sumatera	1451	1451	1451	1451	1451	1451	1451	1451	1451	1451	1451	1451		PPK IMO, Kasubid Kelainan Fasilitas Operasi KA
			Stasiun	17	Perawatan Stasiun Milik Pemerintah	0	0	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	7,000,000,000	PPK IMO, Kasubid Jalur dan Bangunan KA WII I
			Dokumen	1	Jasa Konsultansi Management Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Wilayah Daop 1 Jakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3,616,050,000	PPK IMO, Kasubid Jalur dan Bangunan KA WII I
			Dokumen	1	Jasa Konsultansi Management Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Wilayah Daop 2 Bandung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2,376,500,000	PPK IMO, Kasubid Jalur dan Bangunan KA WII I
			Dokumen	1	Jasa Konsultansi Management Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Wilayah Daop 3 Cirebon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2,171,120,000	PPK IMO, Kasubid Jalur dan Bangunan KA WII I
			Dokumen	1	Jasa Konsultansi Management Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Wilayah Daop 4 Semarang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2,262,260,000	PPK IMO, Kasubid Jalur dan Bangunan KA WII I
			Dokumen	1	Jasa Konsultansi Management Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Wilayah Daop 5 Purwokerto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2,221,680,000	PPK IMO, Kasubid Jalur dan Bangunan KA WII I
			Dokumen	1	Jasa Konsultansi Management Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Wilayah Daop 6 Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2,222,630,000	PPK IMO, Kasubid Jalur dan Bangunan KA WII I
			Dokumen	1	Jasa Konsultansi Management Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Wilayah Daop 7 Madiun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2,321,710,000	PPK IMO, Kasubid Jalur dan Bangunan KA WII I
			Dokumen	1	Jasa Konsultansi Management Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Wilayah Daop 8 Surabaya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2,543,360,000	PPK IMO, Kasubid Jalur dan Bangunan KA WII I
			Dokumen	1	Jasa Konsultansi Management Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Wilayah Daop 9 Jember	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2,542,700,000	PPK IMO, Kasubid Jalur dan Bangunan KA WII I
			Dokumen	1	Jasa Konsultansi Management Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Wilayah Divre I Sumatera Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2,317,760,000	PPK IMO, Kasubid Jalur dan Bangunan KA WII II
			Dokumen	1	Jasa Konsultansi Management Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Wilayah Divre II Sumatera Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2,027,040,000	PPK IMO, Kasubid Jalur dan Bangunan KA WII II
			Dokumen	1	Jasa Konsultansi Management Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Wilayah Divre III Sumatera Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2,591,650,000	PPK IMO, Kasubid Jalur dan Bangunan KA WII II
			Dokumen	1	Jasa Konsultansi Management Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Wilayah Divre IV Tanjung Karang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2,360,750,000	PPK IMO, Kasubid Jalur dan Bangunan KA WII II
			Dokumen	1	Survey dan Update Data Pada Aplikasi MOPS di Wilayah BTP DKI Jakarta dan Banten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7,000,000,000	PPK IMO, Kasubid Jalur dan Bangunan KA WII I

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab
						Bulan-1	Bulan-2	Bulan-3	Bulan-4	Bulan-5	Bulan-6	Bulan-7	Bulan-8	Bulan-9	Bulan-10	Bulan-11	Bulan-12		
	Meningkatnya KEHANDALAN Prasarana Perkeretaapian	PERSENTASE PENGOPERASIAN JALUR KA YANG SESUAI DENGAN TQI	%	82.84	Kondisi Jalur Kereta Api yang sesuai Track Quality Index (TQI) dengan Kecepatan Minimum 80 Km/Jam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82.84	-	PPK IMO, Kasubdit Kelainan Jalur dan Bangunan KA
2	Meningkatnya KAPASITAS Prasarana Transportasi Kereta Api	JUMLAH PKNPKW/ SIMPUL TRANSPORTASI YANG TERHUBUNG JALUR KERETA API	Lokasi	1	Pembangunan Jalur KA Antara Rantau Prapat - Kota Pinang (segmen Rantau Prapat - Pondok S2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-	BTP Sumatera Bagian Utara
			Lokasi	1	Pembangunan Jalur KA Bandara Raden Inten II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	BTP Jakarta dan Banten
			Lokasi	-	Pembayaran Kegiatan Pembangunan Prasarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Provinsi Sumatera Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	2,925,496,703,000	PPK Pembangunan LRT Sumsel, Kasubdit Jalur dan Bangunan WII II
			Lokasi	1	Pembangunan KA Bandara NYIA Kulonprogo sepanjang 6 Km/sp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-	BTP Jawa Bagian Timur
			Lokasi	1	Pembangunan Jalur KA menuju Pelabuhan Tanjung Mas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-	BTP Jawa Bagian Tengah
			Lokasi	3	Pembangunan Jalur KA Makassar-Parepare Segmen 3 (Maros-Pangkajene)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	-	BTP Jawa Bagian Timur
			Laporan	2	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jalur dan Bangunan KA Wilayah I	0	1	0	0	0	0	2	-	-	-	-	-	549,567,000	Kasubdit Jalur dan Bangunan KA WII I
			Laporan	2	Bimbingan Teknis, serta Koordinasi Subdit Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah II	0	1	0	0	0	0	0	0	2	-	-	-	464,642,000	Kasubdit Jalur dan Bangunan KA WII II
			Laporan	2	Bimbingan Teknis Fasilitas Operasi Kereta Api (Pensinyalan, Telekomunikasi dan Instalasi Listrik)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	-	-	558,611,000	Kasubdit Fasilitas Operasi KA
			Laporan	12	Monitoring dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jalur dan Bangunan KA Wilayah I	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1,129,045,000	Kasubdit Jalur dan Bangunan KA WII I
			Laporan	12	Pemeriksaan dan Pengawasan Prasarana Fasilitas Operasi Kereta Api (Pensinyalan, Telekomunikasi dan Instalasi Listrik)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	436,272,000	Kasubdit Fasilitas Operasi KA
			Laporan	12	Monitoring dan Evaluasi Jalur dan Bangunan KA Wilayah II	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	511,995,000	Kasubdit Jalur dan Bangunan KA WII II
			Unit	134	Pengadaan Wesel R.54 sebanyak 134 Unit untuk Wilayah Jawa dan Sumatera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134	-	-	124,233,191,000	PPK Perawatan, Kasubdit Kelainan Jalur dan Bangunan KA
			Unit	-	Pengadaan Ballast Cleaner (MYC 2019-2021)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,883,810,000	PPK Perawatan, Kasubdit Kelainan Jalur dan Bangunan KA
3	Terlaksananya PERUMUSAN REGULASI dan KEBUANGAN dalam Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian	JUMLAH REKOMENDASI KEBUANGAN DIBIDANG PRASARANA PERKERETAAPIAN	Dokumen	1	DED Pembangunan Jembatan KSPN danau Toba Tahap I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-	-	2,459,800,000	PPK Fasilitas, Kasubdit Jalur dan Bangunan KA WII II
			Dokumen	1	DED Pembangunan Sistem Pensinyalan dan Telekomunikasi serta Bangunan Stasiun KSPN danau Toba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-	-	2,857,600,000	PPK Fasilitas, Kasubdit Fasilitas Operasi KA
			Dokumen	1	DED Pembangunan Jembatan KA Antara Rajapolah-Banjari Lintas Bandung -Kroya Tahap 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-	-	2,459,400,000	PPK Fasilitas, Kasubdit Jalur dan Bangunan KA WII I
			Dokumen	1	DED Pembangunan Jembatan KSPN Borobudur Tahap I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2,415,600,000	PPK Fasilitas, Kasubdit Jalur dan Bangunan KA WII I
			Dokumen	1	DED Pembangunan Sistem Pensinyalan dan Telekomunikasi serta Bangunan Stasiun KSPN Borobudur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2,818,200,000	PPK Fasilitas, Kasubdit Fasilitas Operasi KA, Kasubdit Jalur dan Bangunan KA WII I
			Dokumen	1	DED Jembatan Lintas Kacang-Sawahlunto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-	-	2,784,300,000	PPK Fasilitas, Kasubdit Jalur dan Bangunan KA WII II
			Dokumen	1	DED Terowongan Muarokalaban - Sawahlunto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-	-	1,745,400,000	PPK Fasilitas, Kasubdit Jalur dan Bangunan KA WII II
			Dokumen	1	DED Pembangunan Jalur KA Longout Tegayneng-Tanahan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-	-	2,261,700,000	PPK Fasilitas, Kasubdit Jalur dan Bangunan KA WII II
			Dokumen	1	DED Pembangunan Jalur Ganda KA antara Cicalengka-Knai Lintas Bandung-Kroya (Tahap 1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-	-	1,601,900,000	PPK Fasilitas, Kasubdit Jalur dan Bangunan KA WII I
			Dokumen	1	DED Pembangunan Jalur Ganda KA antara Knai-Cipenduy Lintas Bandung-Kroya (Tahap 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-	-	1,659,600,000	PPK Fasilitas, Kasubdit Jalur dan Bangunan KA WII I
			Dokumen	1	DED Pensinyalan Telekomunikasi dan Elektrifikasi Jalur Ganda Padalarang-Cicalengka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-	-	1,308,400,000	PPK Fasilitas, Kasubdit Fasilitas Operasi KA
			Dokumen	1	DED Pembangunan Jembatan untuk doubletrack di BH1549 antara Kesugihan-Maos Lintas Banjar-Kroya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-	-	1,609,900,000	PPK Fasilitas, Kasubdit Jalur dan Bangunan KA WII I
			Dokumen	1	DED underpass Bukit Duri JPL 14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-	-	1,066,800,000	PPK Fasilitas, Kasubdit Jalur dan Bangunan KA WII I
			Dokumen	1	DED Intermoda KA ke Pelabuhan Garongkong dan Makassar New Port	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-	-	1,203,600,000	PPK Fasilitas, Kasubdit Jalur dan Bangunan KA WII I
			Dokumen	1	DED reaktivasi Jalur KA Naras - Sungai Limau, Sumbang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-	-	3,400,000,000	PPK Fasilitas, Kasubdit Jalur dan Bangunan KA WII II
			Dokumen	1	Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, Spesifikasi Teknis, Kriteria dan Prosedur Jalur dan Bangunan KA Wilayah I & II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-	519,806,000	Kasubdit Jalur dan Bangunan KA WII I & II
			Dokumen	18	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Tentang Organisasi dan Tata Kerja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	781,562,000	Kasubdit TU

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab
						Bulan-1	Bulan-2	Bulan-3	Bulan-4	Bulan-5	Bulan-6	Bulan-7	Bulan-8	Bulan-9	Bulan-10	Bulan-11	Bulan-12		
	Terlaksananya PERUMUSAN REGULASI dan KEBIJAKAN dalam Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian	JUMLAH REKOMENDASI KEBIJAKAN DIBIDANG PRASARANA PERKERETAAPIAN	Dokumen	-	Jasa Konsultan Pembangunan Kereta Api Ringan/LRT Terintegrasi di Wilayah Jabodebek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,909,904,000	PPK Pembangunan LRT Jabodebek, Kasubdit Jalur dan Bangunan KA Wil I	
			Dokumen	1	Project Management Unit (PMU) Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	23,888,450,000	PPK Fasilitas, PPK Pembangunan MRT East West dan Kasubdit Jalur dan Bangunan KA Wil I	
			Dokumen	-	Engineering Services For Jakarta Mass Rapid Transit East-West Line Project Phase I (PHLN)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000,000	PPK Pembangunan MRT East West, Kasubdit Jalur dan Bangunan KA Wil I	
			Laporan	1	Rapat Evaluasi Hasil Kinerja Satker Prasarana bersama Direktorat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	375,000,000	PPK Fasilitas, Kasubbag TU	
			Laporan	2	Rakornis Direktorat Prasarana Perkeretaapian	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	900,000,000	PPK Fasilitas, Kasubbag TU
4	Meningkatnya Kinerja PENGENDALIAN dan PENGAWASAN Prasarana Perkeretaapian	JUMLAH SERTIFIKAT KELAikan PRASARANA PERKERETAAPIAN	Sertifikat	100	Sertifikasi Fasilitas Operasi Kereta Api	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	744,508,000	Kasubdit Kelaikan Fasilitas Operasi KA	
				50	Sertifikasi Jalur dan Bangunan Kereta Api	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	553,395,000	Kasubdit Kelaikan Jalur dan Bangunan KA
			Laporan	2	Bimbingan dan Koordinasi Teknis Kelaikan Fasilitas Operasi Kereta Api	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		2	552,961,000	Kasubdit Kelaikan Fasilitas Operasi KA
			Laporan	2	Bimbingan Teknis Kelaikan Jalur dan Bangunan Kereta Api	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	550,466,000	Kasubdit Kelaikan Jalur dan Bangunan KA	
				PERSENTASE PENETAPAN / PERSETUJUAN / PERIJINAN DIBIDANG PRASARANA PERKERETAAPIAN YANG TEPAT WAKTU	%	100	Penetapan Persetujuan Dokumen Teknis (jin Perpotongan/Persinggungan Antara Jalur Kereta Api Dengan Bangunan Lain dan jin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian PT Kereta Api Indonesia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	-
5	Tercapainya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT di Lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian	PERSENTASE PENYERAPAN ANGGARAN	%	97.50	Penyerapan Anggaran Satker PPPPKA	5.25	9.25	9.33	14.22	18.4	19.68	24.39	69.98	73.01	69.59	91.84	97.5	-	PPK Fasilitas, Kasubbag TU
			Laporan	1	Kegiatan Operasional Pengadaan Lahan LRT Jabodebek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1,980,169,000	PPK Tanah LRT Jabodebek, Kasubdit Jalur dan Bangunan KA Wil I
			Laporan	1	Layanan Perkantoran : (Kantor LRT Sumsel, Kantor IMO, Kantor Perawatan, Kantor Fasilitas, Subbag TU, Kantor LRT Jabodebek, Kantor Pengadaan Tanah LRT Jabodebek)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16,487,899,000	PPK LRT Sumsel, PPK IMO, PPK Perawatan, PPK Fasilitas, PPK Pembangunan LRT Jabodebek, PPK Pengadaan Tanah LRT Jabodebek dan Kasubbag TU
			Laporan	1	Layanan Internal : a. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (Kantor Pembangunan LRT Jabodebek, Kantor IMO, Kantor Fasilitas, Kantor Perawatan dan Subbag Tata Usaha), b. Fasilitas Perkantoran (Kantor Pembangunan LRT Jabodebek, Kantor IMO, Kantor Fasilitas dan Kantor Perawatan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1,436,958,000	PPK LRT Sumsel, PPK IMO, PPK Perawatan, PPK Fasilitas, PPK Pembangunan LRT Jabodebek, PPK Pengadaan Tanah LRT Jabodebek dan Kasubbag TU
			Laporan/Dokumen	2	Layanan Dukungan Manajemen Satker : a. Administrasi Kegiatan Pelelangan (Kantor IMO, Kantor Fasilitas, Kantor Pembangunan LRT Jabodebek dan Kantor Perawatan), b. Administrasi Kegiatan Lainnya (Kantor LRT Sumsel, Kantor IMO, Kantor Perawatan, Kantor Fasilitas dan Kantor Pembangunan LRT Jabodebek), c. Sistem Akuntansi Instansi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	13,609,502,000	PPK LRT Sumsel, PPK IMO, PPK Perawatan, PPK Fasilitas, PPK Pembangunan LRT Jabodebek, PPK Pengadaan Tanah LRT Jabodebek dan Kasubbag TU
			Dokumen	9	Penyelenggaraan Kegiatan Penyusunan Dokumen SAKIP dan LAPTAH Direktorat Prasarana Perkeretaapian	2	3	0	4	0	0	5	0	0	7	0	9	709,600,000	Kasubbag TU
			Laporan	2	Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Prasarana Perkeretaapian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2,073,024,000	Kasubbag TU
		PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) BIDANG PRASARANA PERKERETAAPIAN	Rp	1,678,728,000	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi Bidang Perhubungan & Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	139,894,000	279,788,000	419,682,000	559,576,000	699,470,000	839,364,000	979,258,000	1,119,152,000	1,259,046,000	1,398,940,000	1,538,834,000	1,678,728,000	-	Bendahara Penerimaan, Kasubbag TU

Jakarta, Januari 2020

DIREKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN



HERU WISNU WIBOWO
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650710 199003 1 002